



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WAYAN KOSTER**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **35472**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.141.570.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.218.630.000
2. Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.600 m2/206 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
4. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 15.760 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 472.800.000
6. Tanah Seluas 12.810 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 384.300.000
7. Tanah Seluas 8.840 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 265.200.000
8. Tanah Seluas 1.790 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 28.640.000
9. Tanah Seluas 12.600 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 313.600.000**



1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 3.5 Q A/T / MINIBUS Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 313.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	119.670.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.381.604
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.590.221.604

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.590.221.604

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.